



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Nomor : 1994/WKPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/V/2026 Jakarta, 09 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Bulanan
Bulan April 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di -
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bersama ini kami sampaikan berkas laporan bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk periode April 2026.

Berkas laporan ini sebagai bahan evaluasi dan monitoring guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.


Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta,
Yuswan. S.H., M.H.
NIP. 197403071993031004

Tembusan :
1. Arsip



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA

LAPORAN BULANAN APRIL

2026

(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	17
BAB III. TELAAHAN	26
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	27

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Februari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

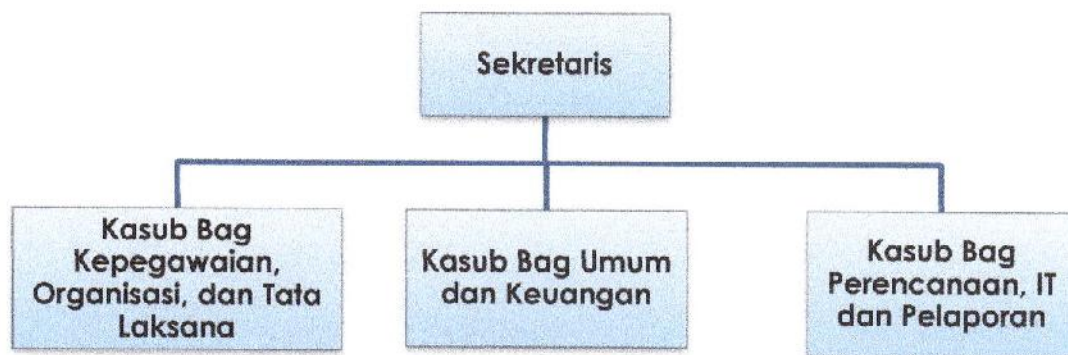
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



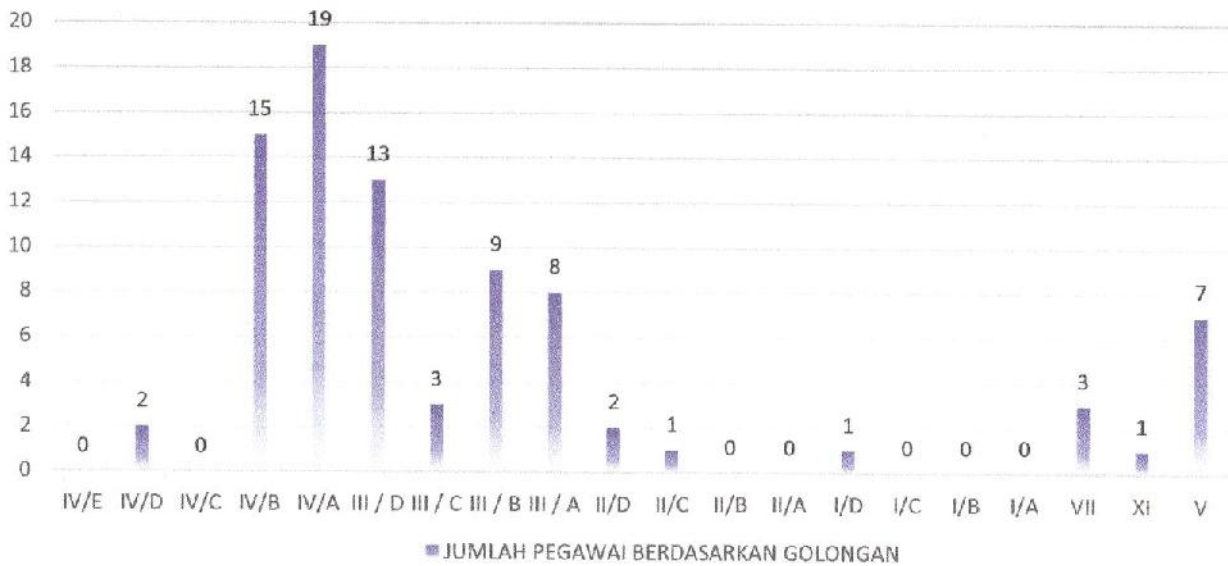
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2026 adalah 69 orang PNS, 4 orang CPNS, 11 orang PPPK, yang terdiri dari Laki – Laki yang berjumlah 55 orang dan perempuan 29 orang, adapun rincian sebagai berikut:

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.				
2.				

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET

PELANTIKAN / PENGANGKATAN JABATAN BARU

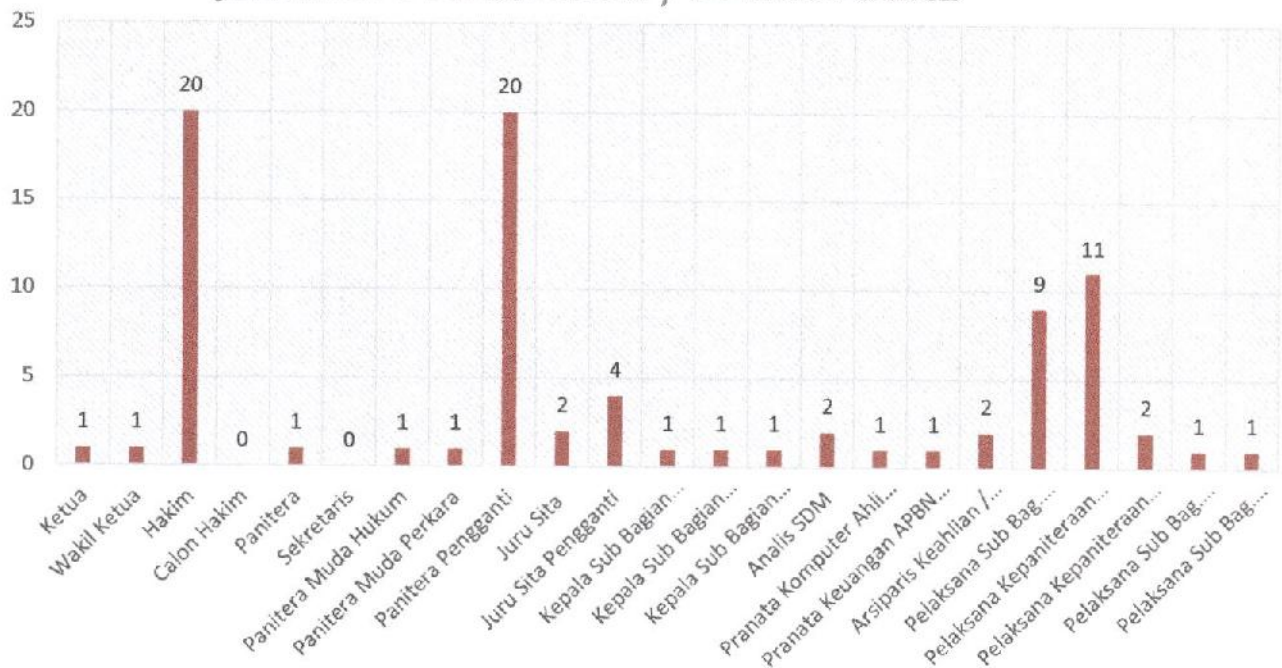
NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	Ahmad Suja'i, S.IP., M.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	TMT 24 April 2026
2	Harry Marangkup Tua, S.Sos.	Pengelola Penanganan Perkara	Penata Layana Operasional	TMT 24 April 2026

PENSIUN

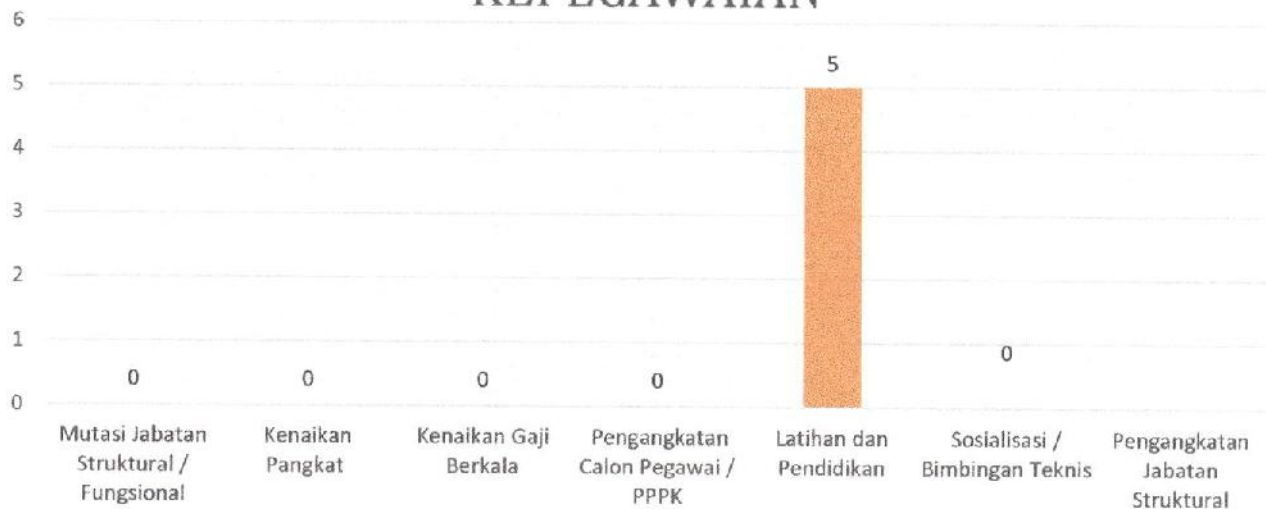
NO	NAMA	JABATAN	KET

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

No.	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	5	-	-	5
2		PTTUN JAKARTA	2	-	-	38
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	1	-	-	1
4		DIRJEND. BADIMIL TUN	2	-	-	2
5		KOMISI YUDISIAL	1	-	0	1
6		PERKARA / LAIN-LAIN	158	-	-	158
7		UMUM / LAIN-LAIN	27	-	-	27
TOTAL						232

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub Bagian Kepegawaian dan Otala	92	0	0	92
2	Sub Bagian Umum dan Keuangan	41	0	0	41
3	Sub Perencanaa IT, Pelaporan	8	0	0	8
4	Kepaniteraan Muda Perkara	346	0	0	346
5	Kepaniteraan Muda Hukum	36	0	0	36
6	Lain - Lain	0	0	0	0
TOTAL					523

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan April Tahun 2026 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
Total		1626	20	205	1851

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan April 2026 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program: Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	40.512.837.000	0	11.982.986.575	6.949.164.112	18.932.150.687	46,73 %	21.580.686.313
WA Program Dukungan Manajemen	40.512.837.000	0	11.982.986.575	6.949.164.112	18.932.150.687	46,73 %	21.580.686.313
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	20.000.000	0	0	0	0	0,00 %	20.000.000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20.000.000	0	0	0	0	0,00 %	20.000.000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	20.000.000	0	0	0	0	0,00 %	20.000.000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20.000.000	0	0	0	0	0,00 %	20.000.000
053.0A Pengadaan Meubelair	20.000.000	0	0	0	0	0,00 %	20.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	0	0	0	0	0,00 %	20.000.000
000001 Pengadaan Meja dan Kursi CPNS	20.000.000	0	0	0	0	0,00 %	20.000.000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	40.492.837.000	0	11.982.986.575	6.949.164.112	18.932.150.687	46,75 %	21.560.686.313
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.492.837.000	0	11.982.986.575	6.949.164.112	18.932.150.687	46,75 %	21.560.686.313
EBA.962 Layanan Umum	1.440.000	0	0	700.000	700.000	48,61 %	740.000
006 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.440.000	0	0	700.000	700.000	48,61 %	740.000
005.0A Layanan Sarana Dan Prasarana Internal Ekstrakompetabel	1.440.000	0	0	700.000	700.000	48,61 %	740.000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompetabel	1.440.000	0	0	700.000	700.000	48,61 %	740.000
000097 Printer	1.440.000	0	0	700.000	700.000	48,61 %	740.000
EBA.994 Layanan Perkantoran	40.491.397.000	0	11.982.986.575	6.948.364.112	18.931.314.687	46,75 %	21.559.782.313
001 Kas dan Tunjangan	35.293.269.000	0	9.984.968.632	6.532.562.065	16.517.530.697	46,80 %	18.775.738.303
001.0A Gaji DAN TUNJANGAN	35.293.269.000	0	9.984.968.632	6.532.562.065	16.517.530.697	46,80 %	18.775.738.303
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4.373.990.000	0	1.543.416.100	309.675.100	1.853.091.200	42,37 %	2.520.898.800
000002 Belanja Gaji Pokok PNS	4.233.548.000	0	1.240.340.300	0	1.240.340.300	29,28 %	-816.792.300
000003 Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	2.000	0	303.075.800	4.213.500	307.289.300	15,364 %	307.287.300
000004 Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	323.873.000	0	0	0	0	0,00 %	323.873.000
000102 Belanja Gaji Pokok PNS (BA BUN)	3.626.567.000	0	0	305.461.600	305.461.600	8,42 %	3.321.106.400
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.000	0	18.140	3.638	21.778	36,30 %	38.222
000005 Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.000	0	14.534	3.608	18.142	36,28 %	31.858

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program: Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006 Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5.000	0	0	0	0	0,00 %	5.000
000007 Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5.000	0	3.606	30	3.636	72,72 %	1.364
511121 Belanja Tunj. Suami Istri PNS	367.458.000	0	118.601.490	23.711.808	142.313.298	38,73 %	225.144.702
000008 Belanja Tunjangan Suami Istri PNS	314.964.000	0	95.402.152	23.290.458	118.692.610	37,68 %	196.271.390
000009 Belanja Tunjangan Suami Istri PNS (Gaji ke 13)	26.247.000	0	0	0	0	0,00 %	26.247.000
000010 Belanja Tunjangan Suami Istri PNS (Gaji ke 14)	26.247.000	0	23.199.338	421.350	23.620.688	89,99 %	2.626.312
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	118.370.000	0	38.777.138	8.084.258	47.861.396	40,43 %	70.508.604
000011 Belanja Tunjangan Anak PNS	101.460.000	0	32.021.722	7.915.718	39.937.440	39,36 %	61.522.560
000012 Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8.455.000	0	0	0	0	0,00 %	8.455.000
000013 Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8.455.000	0	7.755.416	168.540	7.923.956	93,72 %	531.044
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	0	10.620.000	2.880.000	13.500.000	31,25 %	29.700.000
000014 Belanja Tunjangan Struktural PNS	37.440.000	0	9.000.000	1.620.000	10.620.000	28,37 %	26.820.000
000016 Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2.880.000	0	0	0	0	0,00 %	2.880.000
000016 Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2.880.000	0	1.620.000	1.260.000	2.880.000	100,00 %	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	190.337.000	0	66.645.000	13.390.000	80.035.000	42,05 %	110.302.000
000017 Belanja Tunj. Fungsional PNS	163.200.000	0	53.255.000	13.390.000	66.645.000	40,84 %	96.555.000
000018 Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13.600.000	0	0	0	0	0,00 %	13.600.000
000019 Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13.537.000	0	13.390.000	0	13.390.000	98,91 %	147.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	140.000.000	0	10.781.365	123.202	10.904.567	7,79 %	129.095.433
000020 Belanja Tunj. PPh PNS	120.000.000	0	404.808	123.202	528.010	0,44 %	119.471.990
000021 Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	10.000.000	0	0	0	0	0,00 %	10.000.000
000022 Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	10.000.000	0	10.376.547	0	10.376.547	103,77 %	-376.547
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257.525.000	0	81.834.600	16.222.880	98.056.680	38,08 %	159.468.320
000023 Belanja Tunj. Beras PNS	257.525.000	0	81.834.600	16.222.880	98.056.680	38,08 %	159.468.320
511129 Belanja Uang Makan PNS	389.741.000	0	148.785.000	44.139.000	192.924.000	21,68 %	696.817.000
000024 Gol IV (29 org x 22 hr x 12 Bln)	308.965.000	0	21.052.000	23.788.000	44.840.000	14,51 %	264.123.000
000025 Gol III (60 org x 22 Hr x 12 Bln)	480.730.000	0	56.328.000	18.611.000	74.939.000	15,68 %	385.741.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program: Kegiatan; Output: SubOutput; Komponen: SubKomponen; Akun: Item;
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
00026. Gol II (10 org x 22 Hr x 12 Bin)	90.951.000	0	7.560.000	1.645.000	9.205.000	10.12 %	81.746.000
00027. Gol I (1 org x 22 Hr x 12 Bin)	9.095.000	0	1.785.000	595.000	2.380.000	26.17 %	6.715.000
511151. Belanja Tunjangan Umum PNS	73.654.000	0	14.170.000	2.760.000	16.930.000	22.99 %	56.724.000
000028. Belanja Tunjangan Umum PNS	63.845.000	0	11.410.000	2.760.000	14.170.000	22.19 %	49.675.000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4.902.000	0	0	0	0	0.00 %	4.902.000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4.907.000	0	2.760.000	0	2.760.000	56.25 %	2.147.000
511324. Belanja Tury. PPH Pejabat Negara	5.459.313.000	0	1.521.851.421	1.336.601.357	2.858.452.778	52.36 %	2.600.860.222
000031. Belanja Tury. PPH Pejabat Negara	1.208.702.000	0	1.050.684.765	0	1.050.684.765	86.93 %	158.018.235
000032. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 13)	177.014.000	0	0	0	0	0.00 %	177.014.000
000033. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 14)	410.000.000	0	471.166.656	0	471.166.656	114.92 %	-61.166.656
000103. Belanja Tury. PPH Pejabat Negara (BA BUN)	3.663.596.000	0	0	1.336.601.357	1.336.601.357	36.48 %	2.326.994.643
511339. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	23.225.500.000	0	6.250.100.000	4.733.800.000	10.983.900.000	47.29 %	12.241.600.000
000034. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	8.394.845.000	0	4.840.600.000	0	4.840.600.000	57.66 %	3.554.245.000
000035. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 13)	531.100.000	0	0	0	0	0.00 %	531.100.000
000036. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 14)	2.021.600.000	0	1.409.500.000	0	1.409.500.000	69.72 %	612.100.000
000104. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	9.635.255.000	0	0	2.203.300.000	2.203.300.000	22.87 %	7.431.955.000
000105. Turggakan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	2.642.700.000	0	0	2.530.500.000	2.530.500.000	95.75 %	112.200.000
511611. Belanja Gaji Pokok PPPK	39.600.000	0	134.001.650	29.450.500	162.452.150	412.76 %	-123.852.150
000037. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2.850.000	0	16.199.650	0	16.199.650	566.62 %	-12.340.650
000038. Belanja Gaji Pokok PPPK	33.882.000	0	117.802.000	29.450.500	147.252.500	434.60 %	-113.370.500
000039. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2.850.000	0	0	0	0	0.00 %	2.850.000
511619. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000	0	4.119	920	5.039	71.98 %	1.961
000040. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
000041. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.000	0	439	0	439	43.90 %	561
000042. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	0	3.680	020	4.600	92.00 %	400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program: Kegiatan; Output: SubOutput; Komponen: SubKomponen; Akun: Item;
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511621. Belanja Tunjangan Suasman PPPK	3.704.000	0	6.118.605	1.359.690	7.478.295	201.90 %	-3.774.295
000043. Belanja Tunjangan Suasman PPPK (gaji ke 13)	264.000	0	0	0	0	0.00 %	264.000
000044. Belanja Tunjangan Suasman PPPK	3.176.000	0	5.438.760	1.359.690	6.798.450	214.06 %	-3.622.450
000045. Belanja Tunjangan Suasman PPPK (gaji ke 14)	264.000	0	679.845	0	679.845	257.52 %	-415.845
511622. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.456.000	0	1.418.724	315.272	1.733.996	119.09 %	-277.996
000046. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.250.000	0	1.261.088	315.272	1.576.360	126.11 %	-326.360
000047. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	103.000	0	0	0	0	0.00 %	103.000
000048. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	103.000	0	157.636	0	157.636	153.04 %	-54.636
511624. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	0	1.750.000	350.000	2.100.000	42.86 %	2.800.000
000049. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.200.000	0	1.400.000	350.000	1.750.000	41.67 %	2.450.000
000050. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350.000	0	0	0	0	0.00 %	350.000
000051. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350.000	0	350.000	0	350.000	100.00 %	0
511625. Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.044.000	0	7.205.790	1.593.240	8.799.030	217.58 %	-4.755.030
000052. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.466.000	0	6.372.960	1.593.240	7.966.200	229.84 %	-4.500.200
000053. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289.000	0	0	0	0	0.00 %	289.000
000054. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289.000	0	832.830	0	832.830	288.18 %	-543.830
511628. Belanja Uang Makan PPPK	100.400.000	0	19.747.000	6.297.000	26.044.000	25.94 %	74.356.000
000055. Belanja Uang Makan PPPK	100.400.000	0	19.747.000	6.297.000	26.044.000	25.94 %	74.356.000
511633. Belanja Tunjangan Umum PPPK	10.000	0	8.122.500	1.805.000	9.927.500	99.275 %	-9.917.500
000056. Belanja Tunjangan Umum PPPK	10.000	0	8.122.500	1.805.000	9.927.500	99.275 %	-9.917.500
007. Operasional dan Pemeliharaan Ruang	5.137.338.000	0	1.697.991.843	415.802.047	2.113.793.890	41.24 %	3.023.544.110
002.0A. Kebutuhan Sanitasi Perkantoran	1.623.646.000	0	1.392.997.217	14.817.196	1.407.814.412	86.71 %	215.831.588
521111. Belanja Keperluan Perkantoran	1.543.646.000	0	1.377.004.400	3.505.049	1.380.509.449	89.43 %	163.136.551
000057. Petugas Kebersihan	654.576.000	0	654.576.000	0	654.576.000	100.00 %	0
000058. Sampah	720.096.000	0	720.096.000	0	720.096.000	100.00 %	0
000059. Tambahan Sampah (1 Orang x 8 Bulan)	55.392.000	0	2.332.400	436.000	2.768.400	5.00 %	52.623.600
000101. Air minum Kemasan / Galon	6.000.000	0	0	730.000	730.000	12.17 %	5.270.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000106. Restribusi Sampah	9.000.000	0	0	1.400.000	1.400.000	15,56 %	7.600.000
000109. Keperluan sehari-hari Perkantoran	43.190.000	0	0	939.049	939.049	2,17 %	42.250.951
000111. Pengemudi (1 Orang x 8 Bulan)	55.392.000	0	0	0	0	0,00 %	55.392.000
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80.000.000	0	18.992.817	11.312.146	27.304.963	34,13 %	52.695.037
000060. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	80.000.000	0	18.992.817	11.312.146	27.304.963	34,13 %	52.695.037
002.06. LANGGANAN DAYA JASA	939.491.000	0	395.817.159	58.435.892	454.253.051	48,35 %	485.237.949
521111. Belanja Keperluan Perkantoran	194.000.000	0	182.422.089	323.500	182.795.589	94,22 %	11.204.411
000061. Langganan Internet	190.000.000	0	181.500.000	0	181.500.000	95,53 %	8.500.000
000062. Lisensi Video Conference	4.000.000	0	972.089	323.500	1.295.589	32,39 %	2.704.411
521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.200.000	0	1.059.500	640.000	1.699.500	40,46 %	2.500.500
000063. Biaya Pengiriman Surat Dinas	4.200.000	0	1.059.500	640.000	1.699.500	40,46 %	2.500.500
522111. Belanja Langganan Listrik	706.291.000	0	185.318.220	57.141.942	242.460.162	34,33 %	463.830.838
000064. Belanja Langganan Listrik	706.291.000	0	185.318.220	57.141.942	242.460.162	34,33 %	463.830.838
522112. Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	991.350	330.450	1.321.800	22,03 %	4.678.200
000065. Langganan Telephone	6.000.000	0	991.350	330.450	1.321.800	22,03 %	4.678.200
522113. Belanja Langganan Air	3.000.000	0	0	0	0	0,00 %	3.000.000
000066. Langganan Air	3.000.000	0	0	0	0	0,00 %	3.000.000
522141. Belanja Sewa	26.000.000	0	25.976.000	0	25.976.000	99,91 %	24.000
000067. Langganan Web Hosting	26.000.000	0	25.976.000	0	25.976.000	99,91 %	24.000
002.00. Pemeliharaan Kantor	1.404.251.000	0	193.717.567	57.518.960	251.236.527	17,89 %	1.153.014.473
523111. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	905.993.000	0	118.772.360	42.865.000	161.637.360	17,84 %	744.355.640
000068. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	905.993.000	0	118.772.360	42.865.000	161.637.360	17,84 %	744.355.640
523119. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	42.750.000	0	2.900.000	0	2.900.000	5,85 %	40.250.000
000069. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	42.750.000	0	2.900.000	0	2.900.000	5,85 %	40.250.000
523121. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455.508.000	0	72.445.207	14.653.960	87.099.167	19,12 %	368.408.833
000070. Pemeliharaan Lift	57.000.000	0	44.400.000	5.550.000	49.950.000	87,63 %	7.050.000
000071. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	19.000.000	0	6.750.000	2.150.000	8.900.000	46,84 %	10.100.000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Pejabat	19.000.000	0	6.750.000	2.150.000	0	0,00 %	10.100.000
000072. Pemeliharaan AC Cassete	83.076.000	0	10.310.000	1.000.000	11.310.000	13,61 %	71.766.000
000073. Pemeliharaan Laptop	19.257.000	0	0	950.000	950.000	4,93 %	18.307.000
000074. Pemeliharaan PC	29.820.000	0	900.000	950.000	1.850.000	6,20 %	27.970.000
000075. Pemeliharaan Printer	19.665.000	0	0	2.767.500	2.767.500	14,07 %	16.897.500
000076. Pemeliharaan AC Split	36.708.000	0	4.516.359	0	4.516.359	12,30 %	32.191.641
000077. Pemeliharaan Mesin Pompa	6.982.000	0	0	0	0	0,00 %	6.982.000
000078. Kendaraan Roda 2	13.300.000	0	683.050	751.500	1.434.550	10,79 %	11.865.450
000079. Kendaraan Roda 4	119.700.000	0	4.885.798	834.950	5.720.758	4,78 %	113.979.242
000108. Pemeliharaan barang elektronik lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0,00 %	5.000.000
000110. Pemeliharaan Peralatan Mesin	50.000.000	0	0	0	0	0,00 %	50.000.000
002.00. Operasional Lainnya	203.310.000	0	11.460.000	6.630.000	18.090.000	8,90 %	185.220.000
521111. Belanja Keperluan Perkantoran	123.750.000	0	0	0	0	0,00 %	123.750.000
000080. Pakain Dinas Hakim 26 Org x 2 Stel	31.616.000	0	0	0	0	0,00 %	31.616.000
000081. Pakain Dinas Pegawai 60 Org x 2 Stel	72.960.000	0	0	0	0	0,00 %	72.960.000
000082. Pakain Dinas CPNS 4 Org x 2 Stel	5.798.000	0	0	0	0	0,00 %	5.798.000
000083. Pakain Dinas PPPK 11 Org x 2 Stel	13.376.000	0	0	0	0	0,00 %	13.376.000
521115. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.560.000	0	11.460.000	5.630.000	18.090.000	22,74 %	61.470.000
000084. Honor RPA	21.600.000	0	1.800.000	1.800.000	3.600.000	16,67 %	18.000.000
000085. Honor PPK	21.000.000	0	3.500.000	1.750.000	5.250.000	25,00 %	15.750.000
000086. Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPH	9.000.000	0	1.500.000	750.000	2.250.000	25,00 %	6.750.000
000087. Honor Bendahara Penerimaan	2.400.000	0	400.000	200.000	600.000	25,00 %	1.800.000
000088. Honor Bendahara Pengeluaran	7.920.000	0	1.320.000	660.000	1.980.000	25,00 %	5.940.000
000089. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11.760.000	0	1.960.000	980.000	2.940.000	25,00 %	8.820.000
000090. Honor PPAIP	5.880.000	0	980.000	490.000	1.470.000	25,00 %	4.410.000
002.06. HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	995.280.000	0	0	277.200.000	277.200.000	27,85 %	718.080.000
522141. Belanja Sewa	995.280.000	0	0	277.200.000	277.200.000	27,85 %	718.080.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
 Per Program: Kegiatan, Output: SubOutput: Komponen: SubKomponen: Akun: Item:
 Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000091. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (10 Orang x 12 Bln)	995.280.000	0	0	277.200.000	277.200.000	27,85 %	718.080.000
002.00 Konsultasi ke Pusat Tingkat Banding	31.850.000	0	3.990.000	1.200.000	5.190.000	16,30 %	26.660.000
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.100.000	0	3.240.000	0	3.240.000	12,91 %	21.860.000
000092. Transportasi (2 org x 1 kegiatan)	1.800.000	0	0	0	0	0,00 %	1.800.000
000093. Uang Harian (3 org x 3 hari x 1 kegiatan)	4.950.000	0	390.000	0	390.000	7,88 %	4.560.000
000094. Tiket (2 org x 2 hari x 2 kegiatan)	11.000.000	0	0	0	0	0,00 %	11.000.000
000095. Penginapan (7 org x 1 hari x 1 kegiatan)	7.350.000	0	2.850.000	0	2.850.000	38,78 %	4.500.000
524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000	0	750.000	1.200.000	1.950.000	28,89 %	4.800.000
000096. Perjalanan Dinas Dalam Kota (9 Org x 5 kegi termasuk konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPRN/KANWIL DJKNB/KNSKD)	6.750.000	0	750.000	1.200.000	1.950.000	28,89 %	4.800.000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	0	36.000	100.000	136.000	45,33 %	164.000
EBD.Z25. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	36.000	100.000	136.000	45,33 %	164.000
005. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	300.000	0	36.000	100.000	136.000	45,33 %	164.000
005.0A. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	36.000	100.000	136.000	45,33 %	164.000
521211. Belanja Bahan	300.000	0	36.000	100.000	136.000	45,33 %	164.000
000098. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	36.000	100.000	136.000	45,33 %	164.000

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item:
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	70.602.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	10,20 %	63.402.000
BF Program Penegakan dan Pelayan Hukum	70.602.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	10,20 %	63.402.000
BF.3059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	70.602.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	10,20 %	63.402.000
AEA Koordinasi	19.500.000	0	0	0	0	0,00 %	19.500.000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	19.500.000	0	0	0	0	0,00 %	19.500.000
-005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	19.500.000	0	0	0	0	0,00 %	19.500.000
005.0A Pelaksanaan Pengamanan Sidang	19.500.000	0	0	0	0	0,00 %	19.500.000
521211 Belanja Bahan	19.500.000	0	0	0	0	0,00 %	19.500.000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x25 kali)	19.500.000	0	0	0	0	0,00 %	19.500.000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	196.000	0	0	0	0	0,00 %	196.000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	196.000	0	0	0	0	0,00 %	196.000
-005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	196.000	0	0	0	0	0,00 %	196.000
005.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	196.000	0	0	0	0	0,00 %	196.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.000	0	0	0	0	0,00 %	18.000
000002. Pengiriman Pembitahuan/Panggilan	18.000	0	0	0	0	0,00 %	18.000
521211 Belanja Bahan	178.000	0	0	0	0	0,00 %	178.000
000003. Pengadaan dan Penyediaan Beras Perkara	78.000	0	0	0	0	0,00 %	78.000
000004. Alat Tulis Kantor	100.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.216.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	21,68 %	26.016.000
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.216.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	21,68 %	26.016.000
-005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	33.216.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	21,68 %	26.016.000
005.0A Pos Bantuan Hukum	33.216.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	21,68 %	26.016.000
521211 Belanja Bahan	4.416.000	0	0	0	0	0,00 %	4.416.000
000005. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4.416.000	0	0	0	0	0,00 %	4.416.000
521213 Belanja Jasa Konvensional	28.800.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	25,00 %	21.600.000
000006. Jasa Layanan Konsultasi Hukum	28.800.000	0	4.800.000	2.400.000	2.200.000	25,00 %	21.600.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item:
Periode April 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
OCA Perkara Hukum Perseorangan	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
OCA.002 Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungi peradilan Tata Usaha Negara	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
-005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
005.0A Sidang di luar Gedung Pengadilan	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
522191 Belanja Jasa Lainnya	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
000007. Biaya Uang Kebersihan (3 Orang x 1 Kali)	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.390.000	0	0	0	0	0,00 %	17.390.000
000008. Transportasi 7 Org x 1 Keg	2.100.000	0	0	0	0	0,00 %	2.100.000
000009. Tiket 7 Org x 1 Keg	4.636.000	0	0	0	0	0,00 %	4.636.000
000010. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (7 Orang x 1 Malam x 1 Keg)	6.944.000	0	0	0	0	0,00 %	6.944.000
000011. Uang Harian (7 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan)	3.710.000	0	0	0	0	0,00 %	3.710.000

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan April 2026 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Dalam arahnya pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada kode etik dan peraturan yang berlaku. Seluruh aparatur diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik Kepaniteraan, serta Kode Etik ASN. Selain itu, Ketua juga menguraikan kembali sejumlah regulasi penting, di antaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, sebagai pedoman dalam menjaga disiplin, pengawasan, serta penanganan pengaduan di lingkungan peradilan.
- Evaluasi Kinerja Kepaniteraan dan Sistem Peradilan. Dalam rapat tersebut, disampaikan hasil evaluasi dari Tim Satgas aplikasi SIPP yang masih menemukan adanya ketidaktepatan dalam pengunggahan dokumen persidangan oleh Panitera Pengganti. Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan agar seluruh jajaran kepaniteraan meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab, mengingat aplikasi seperti SIPP dan e-Court berhubungan langsung dengan para pencari keadilan.
- Panitera juga menyampaikan beberapa poin penting, antara lain: Rencana pelaksanaan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terkait pemeriksaan setempat pada bulan Mei 2026.
- Penyelesaian selisih pelaporan PNBPN redaksi sebanyak 58 perkara yang telah ditindaklanjuti per 21 April 2026.
- Tindak lanjut atas temuan Hakim Pengawas Bidang yang telah dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan.
- Ketua PTUN Jakarta menegaskan bahwa setiap temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) harus segera diselesaikan dan dilengkapi dengan

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

eviden yang memadai, karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas satuan kerja.

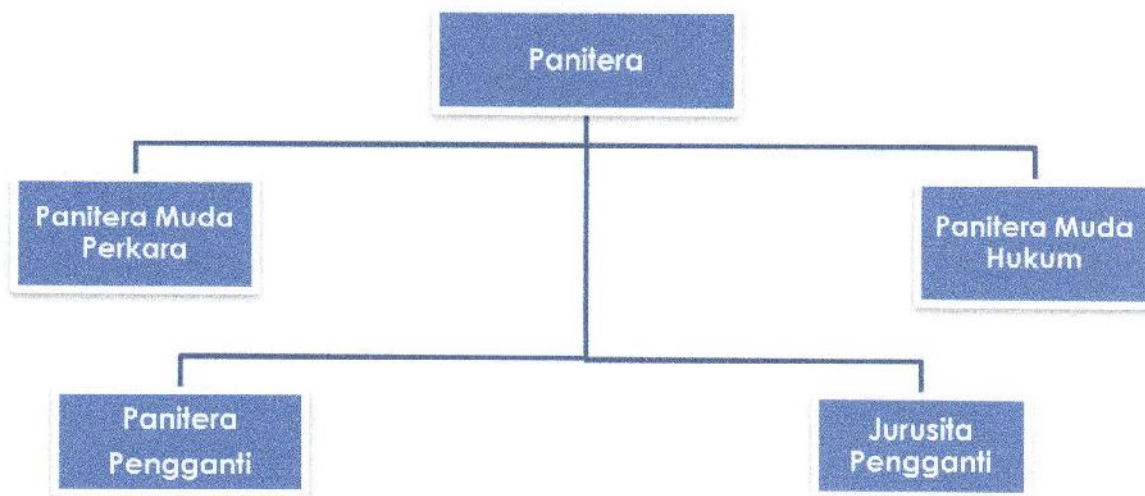
- Laporan Kesekretariatan dan Realisasi Anggaran. Dari sisi kesekretariatan, Plt. Sekretaris menyampaikan laporan realisasi anggaran hingga April 2026:
- DIPA 01 telah terealisasi sebesar Rp 18,85 miliar (40,67%)
- DIPA 05 sebesar Rp 7,2 juta (10,20%), dengan penyerapan terbesar berasal dari Posbakum
- Selain itu, disampaikan pula bahwa: Pembayaran sewa rumah dinas hakim telah direalisasikan untuk 17 dari 22 hakim Kondisi ruang arsip sudah tidak memungkinkan untuk penambahan beban, Saldo Bapor per April 2026 tercatat sebesar Rp 22.568.290
- Ketua PTUN Jakarta memberikan apresiasi atas kinerja kesekretariatan yang dinilai sangat baik, sekaligus mendorong peningkatan yang berkelanjutan.
- Apresiasi dan Perhatian pada Lingkungan Kerja. Dalam kesempatan tersebut, Ketua juga menyampaikan apresiasi terhadap penataan dan perawatan lingkungan kantor yang semakin baik, termasuk penghijauan di setiap lantai yang menciptakan suasana kerja lebih nyaman dan asri. Namun demikian, perhatian terhadap pemeliharaan gedung tetap menjadi prioritas, khususnya untuk mencegah kerusakan seperti kebocoran.
- Menjelang akhir rapat, Ketua PTUN Jakarta kembali mengingatkan seluruh aparatur untuk terus bekerja dengan penuh semangat, menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Seluruh pegawai juga diimbau untuk selalu bekerja sesuai SOP, menjunjung tinggi kode etik profesi, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rapat bulanan ini menjadi momentum penting dalam memastikan seluruh lini di PTUN Jakarta berjalan selaras dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

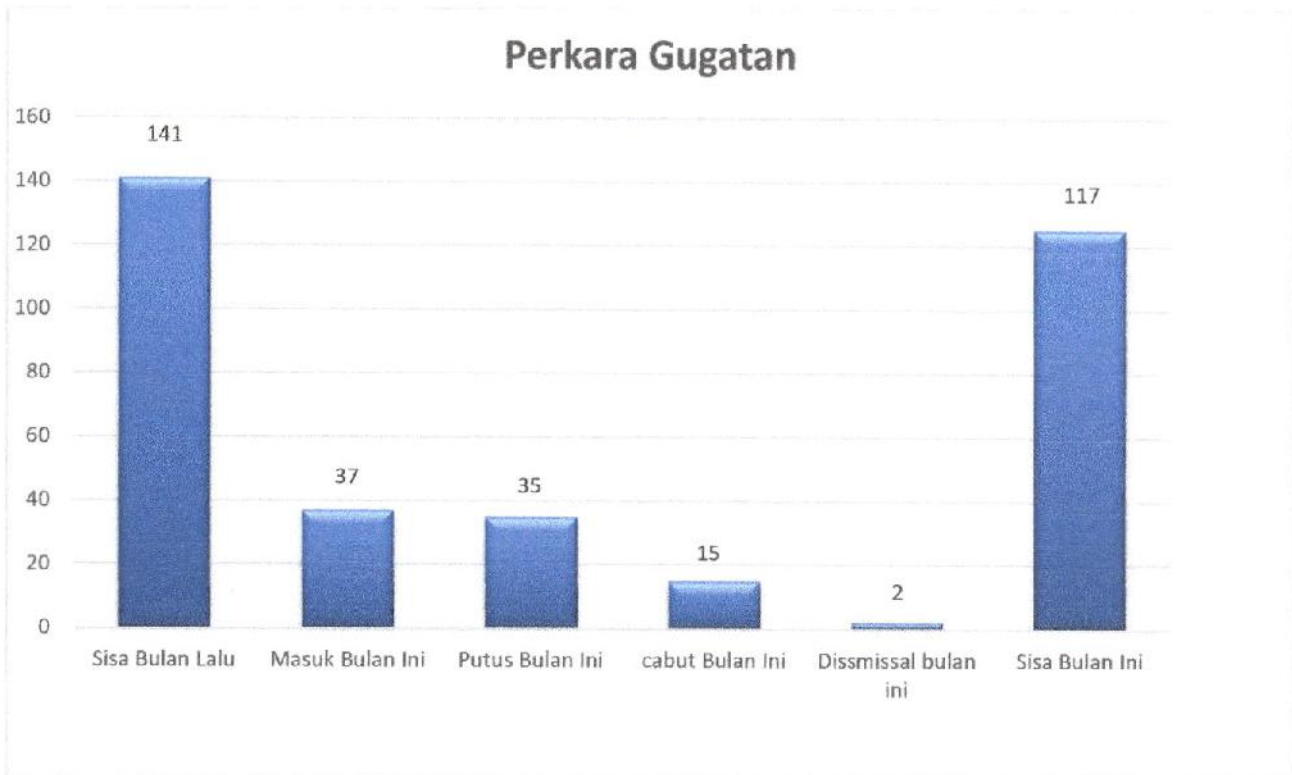
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2026.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2026

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

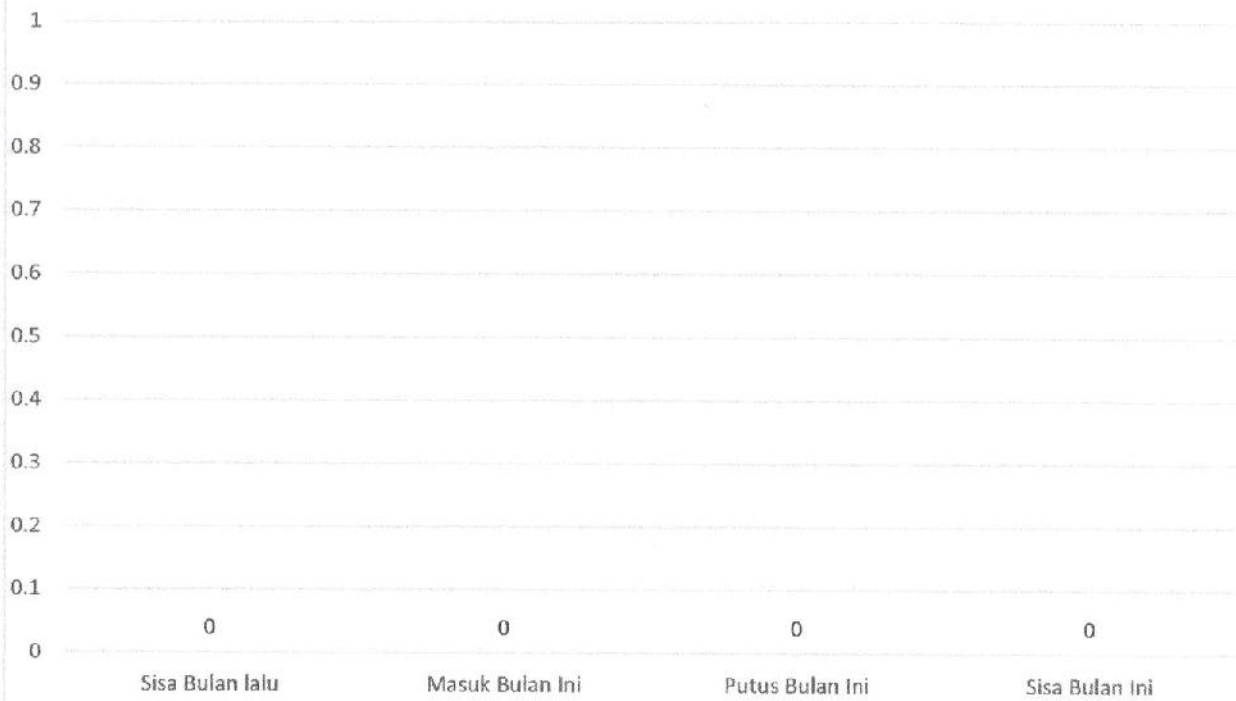
Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $15 + 2 + 35 = 52$ Perkara

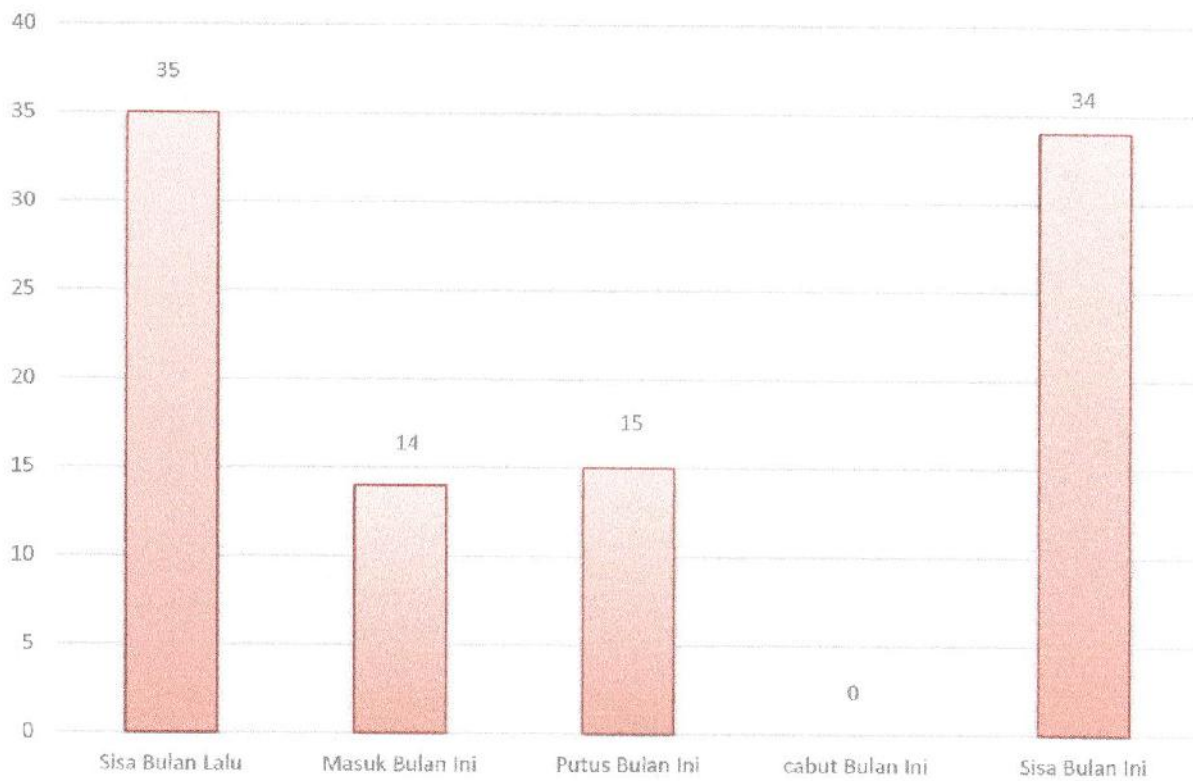
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan



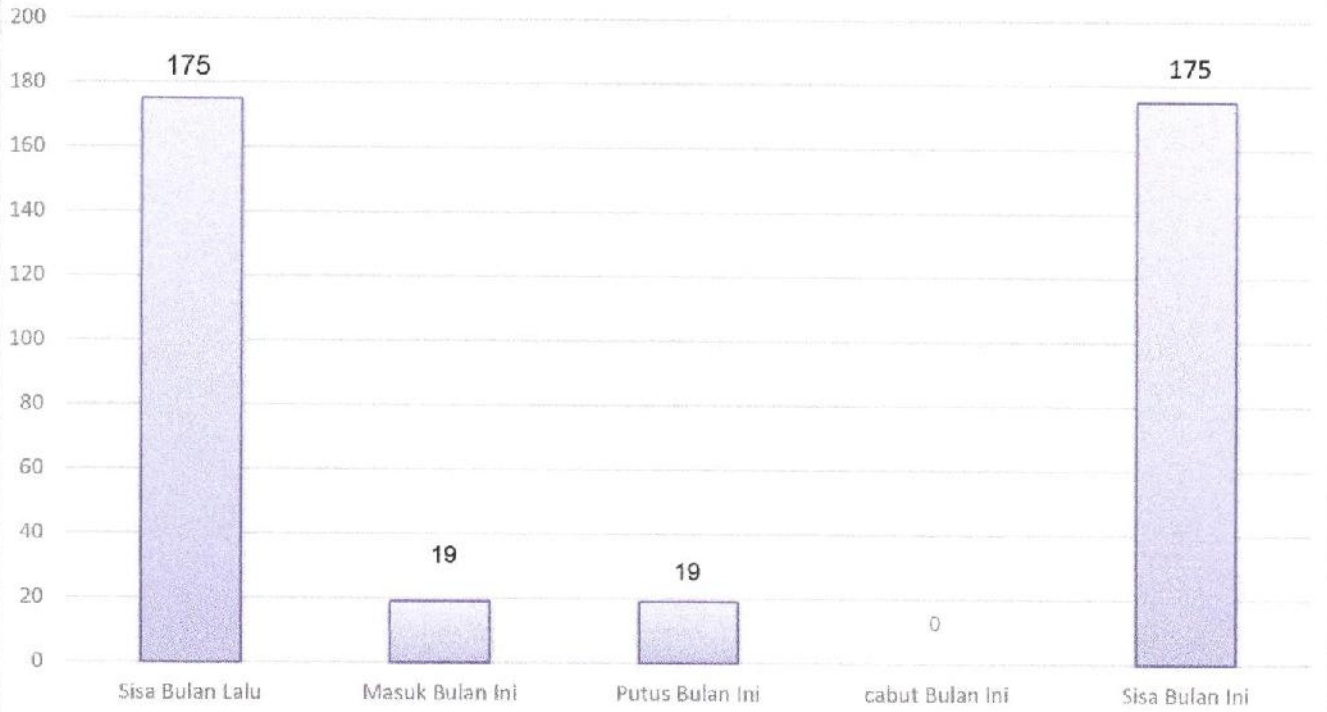
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Kasasi



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan April 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN APRIL TAHUN 2026

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sis. Baku Laku	Perkara		Pengusutan		Terputus		Perlawanan		Putusan						Pemukokan		Tema Bekas		Keterangan						
			Masa	Band	Katib	Pemeriksaan	Band Hukam	Band	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang		Orang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Pertanahan	18	1	-	19	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	5	14	1	2	-	-	3	1	-	-	-
2	Kepegawaian	9	6	-	15	6	-	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	13	-	1	1	-	-	3	-	-	-
3	Perjanjian	8	7	-	15	-	7	7	-	2	-	-	-	1	-	2	2	7	8	1	2	1	3	3	5	2	-
4	Lingkungan Hidup	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/ Pppol	21	5	-	26	3	2	5	-	-	-	-	-	1	5	-	6	20	2	2	-	-	2	3	-	-	-
7	Kapala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Desa/ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengaliran Antar Waktu	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	12	1	-	13	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	1	8	5	-	5	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Faktor Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	22	2	1	23	1	1	2	-	-	-	-	-	3	4	1	8	15	3	4	-	1	3	-	5	-	-
17	Merak	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
18	LAIN LAIN	44	15	1	59	9	5	10	2	1	-	-	-	6	3	2	12	46	4	2	4	-	2	5	-	-	-
	JUMLAH	141	37	2	176	22	16	33	4	3	-	-	-	13	9	20	6	51	125	14	10	7	4	15	19	8	-

MENGETAHUI



Jakarta, 30 April 2026
PANITIA

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
Nip. 197310122000031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan April 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950, Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN APRIL TAHUN 2026

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 30 April 2026



C. KEGIATAN LAIN – LAIN

1. Jakarta, Rabu, 08 April 2026 – Keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melaksanakan kegiatan Halal Bihalal 1447 H yang bertempat di Aula Lantai 4 PTUN Jakarta. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat, penuh kebersamaan, dan kekeluargaan.

Acara Halal Bihalal ini dihadiri oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. beserta istri, Para Yang Mulia, serta seluruh keluarga besar Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Kehadiran para pimpinan dan aparatur peradilan menambah khidmat dan makna dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa bersama sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Ketua PTUN Jakarta yang menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, sambutan juga disampaikan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengajak seluruh aparatur peradilan untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta semangat melayani pasca bulan suci Ramadan. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah melalui tradisi bersalam-salaman sebagai simbol saling memaafkan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang menjadi momen kebersamaan seluruh peserta. Kegiatan ditutup dengan penuh khidmat dan rasa syukur. Momentum Halal Bihalal ini menjadi sarana yang sangat berarti untuk mempererat tali silaturahmi antar aparatur, memperkuat rasa persaudaraan, serta menumbuhkan semangat baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya nilai keikhlasan, kebersamaan, dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 73 PNS, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan April 2026 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk belanja PC All in One, Mesin Scanner, serta Mesin Printer.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta,

Yansapri, S.H., M.H.
NIP. 197403071993031004

Jakarta, 09 Mei 2026

Plt Sekretaris,









Tias Descariasty, S.H.
NIP. 198412092006042002

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan	
2			<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
			
			
			
			
			

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Kompenen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekontrusi.
		

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc		2	Honda Supra X 125 D	
		<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 			<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D		4	Honda Supra X 125 D	
		<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 			<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					